



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA RUU TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
KOMISI X DPR RI DENGAN PEMERINTAH**

- Tahun Sidang : 2021-2022
- Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 22 September 2021
Waktu : Pukul 14.20 WIB s.d. 15.12 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi X Gedung
Nusantara I DPR RI
(secara Fisik dan Virtual)
- Ketua Rapat : Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./Ketua Panja
/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
- Acara
1. Pembahasan DIM RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional
 2. Pembentukan Panja RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional
 3. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
(Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI)
- Hadir : **Pimpinan:**
1. H. SYAIFUL HUDA
 2. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.
 3. Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.
 4. Dr. DEDE YUSUF M.E, S.T., M.I.Pol.
 5. Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.
- Anggota:**
Fraksi PDI Perjuangan
6. dr. SOFYAN TAN (I)
 7. PUTRA NABABAN
 8. MY ESTI WIJAYATI
 9. PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP. (I)
 10. Dr. AHMAD BASARAH (I)
 11. M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA
 12. RANO KARNO, S.IP.

13. Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA
14. Dra. ADRIANA CHARLOTTE
DONDOKAMBHEY, M.Si.
15. VANDA SARUNDAJANG

Fraksi Partai GOLKAR

16. FERDIANSYAH, S.E., M.M.
17. Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. (I)
18. H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI
19. DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si.
20. ADRIAN JOPIE PARUNTU
21. ROBERT JOPPY KARDINAL, SAB.

Fraksi Partai GERINDRA

22. ALI ZAMRONI, S.Sos. (I)
23. Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN
24. Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. (I)
25. Ir. H. NUROJI
26. MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (I)
27. H. MUHAMMAD NUR
28. ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.

Fraksi Partai NASDEM

29. RATIH MEGASARI SINGKARU, M.Sc.
30. RIAN FIRMANSYAH, S.Pd. (I)
31. LESTARI MOERDIJAT (I)
32. EVA STEVANY RATABA
33. Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (I)

Fraksi PKB

34. Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.
35. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
36. Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. (I)
37. MUH. HASSANUDIN WAHID (I)
38. Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.

Fraksi Partai DEMOKRAT

39. A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI
40. Ir. BRAMANTYO SUWONDO, M.M.
41. DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. (I)
42. ANITA JACOBA GAH, S.E. (I)

Fraksi PKS

43. Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T. (I)
44. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.
45. Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., M.Ed. (I)
46. Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. (I)

Fraksi PAN

47. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.

- 48. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi.
- 49. Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.
- 50. MITRA FAKHRUDDIN MB. (I)

Fraksi PPP

- 51. Hj. ILLIZA SAADUDIN DJAMAL, S.E.
- 52. ROJIH (I)

Pemerintah

1. KEMENPORA RI:

- 1) Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si. (Menteri Pemuda dan Olahraga RI)
- 2) Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A. (Sekretaris Menteri)

2. KEMENDAGRI RI:

- 1) Dr. HARI NUR CAHYA MURNI, M.Si. (Dirjen Bina Pembangunan Daerah)
- 2) Ir. ZANARIAH, M.Si. (Direktur SUPD IV)

3. KEMENKEU RI:

- 1) ISA RACHMATARWATA, M.Math. (Dirjen Anggaran)
- 2) DIDIK KUSNAINI, S.E., M.P.P. (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran)
- 3) MUJIBUDA'WAH (Kasubdit Penganggaran K/L II)

4. KEMENKUMHAM RI:

- 1) Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP, S.H., M.Si. (Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga)
- 2) Dr. ROBERIA, S.H., M.H. (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan)

5. KEMENPAN RB RI:

- 1) Drs. DWI WAHYU ATMAJI, MPA. (Sekretaris Menteri)
- 2) R. RORO VERA YUWANTARI SUSILASTUTI, S.IP., M.Si. (Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

KETUA RAPAT/F-P. DEMOKRAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.):

Hari ini apakah bisa dimulai ya?

PIMPINAN KOMISI/F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.):

Siap Kang Dede.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Hetifah.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera.

Om swastiastu.

Shalom.

Namo buddhaya.

Om shanti, shanti, shanti om.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Pertama saya doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini kita tetap bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik karena seyogianya hari ini kita sedang membahas undang-undang yang bisa membantu kebugaran bagi rakyat Indonesia Amin. Izinkan Pak Ketua saya memulai rapat ini dan kita menyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIMULAI PUKUL 14.23 WIB)

Untuk sementara waktunya saya tetapkan terlebih dahulu sampai jam 16.00 WIB ya, bagaimana? Sampai jam 16.00 WIB. Baik.

(RAPAT: SETUJU)

- Yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta jajarannya.
- Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri RI atau yang mewakili. Dalam hal ini yang mewakili Menteri Dalam Negeri adalah Ibu Hari Nur Cahya Murni.
- Yang kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI beserta jajarannya dalam hal ini diwakili oleh, hadir enggak ya? Belum mungkin. Oh ada ya.
- Yang kami hormati Menteri Keuangan RI beserta jajarannya yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Isa.
- Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya Pak Dhahana.
- Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang terhormat.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama diberi kesempatan untuk melakukan rapat kerja bersama dengan Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga yang tampak selalu muda terus dan Saudara Menteri Dalam Negeri RI, Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Saudara Menteri Keuangan RI, Saudara Menteri Hukum dan HAM dan dalam keadaan sehat walafiat.

Sekretariat komisi sudah melaporkan ada 25 anggota yang hadir baik secara fisik maupun virtual dari 9 fraksi. Jadi sudah melebihi dari separuh unsur fraksi dengan demikian maka kita kuorum untuk bisa menetapkan keputusan apa pun yang bisa kita tetapkan bersama. Sudah naik ya sudah ada 30, berarti sudah ada 30 anggota.

Merujuk Surat Presiden RI R-29/Pres/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang SKN adalah Menteri Olahraga RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI. Untuk itu kami ingin menanyakan terlebih dahulu pemerintah apakah para menteri atau yang mewakili sudah hadir semua?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Sudah hadir Pak Ketua dan pemerintah siap membahas.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih. Dari Kemenpan RB saya belum, oh ada perwakilannya sudah ada ya. Pak Dwi nanti akan masuk sini. Baik terima kasih.

Berikutnya agenda rapat kita hari ini harus saya sampaikan adalah pembahasan DIM RUU SKN, pembentukan panja, dan lain-lain. Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati.

Tentu dari tiga agenda tersebut kita akan bahas satu persatu. Namun sebelum memasuki agenda rapat kita perlu dijelaskan terlebih dahulu dalam DIM yang dipaparkan nanti kurang lebih ada 800 DIM terdiri dari DIM yang diubah, DIM yang tidak berubah, dan DIM yang masih sama. Jadi saya perlu kesepakatan Bapak dan Ibu semua untuk DIM yang masih sama perlu dibacakan atau tidak perlu dibacakan? Tidak perlu ya?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Ya tidak perlu.

KETUA RAPAT:

Karena kan lumayan ini waktunya dibaca dahulu. Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Pembahasan DIM RUU SKN perlu kami sampaikan bahwa dalam rapat kerja dengan Menpora RI, Mendagri, Menpan RB, Menkeu, dan Menkumham pada tanggal 13 September pemerintah melalui Kemenpora telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah revisi Undang-Undang SKN yang berjumlah 861 yang diusulkan tadi ada beberapa jenis yaitu tetap, diubah, dihapus, dan diusulkan baru juga ada juga yang DIM kembali ke rumusan undang-undang *existing*. Terhadap DIM pemerintah tersebut Komisi X telah menelaah dan mencermati jenis dan jumlah DIM dimana DIM-DIM tersebut berdasarkan kajian kami dapat diklasifikasi sebagai berikut. DIM tetap ada 191. Artinya tidak perlu dibacakan lagi, DIM diubah redaksi ada 39, DIM diubah substansi, ini yang menjadi perhatian kita adalah 121, DIM yang dihapus ada 123, DIM usulan baru ada 387. Dengan total 861.

Dari perincian masing-masing DIM tersebut perlu kami sampaikan beberapa isu krusial yang kami dapatkan dalam sandingan antara pandangan DPR RI dan pandangan pemerintah antara lain sebagai berikut:

- Isu krusial.
 1. Kelembagaan KONI dan KOI.
 - Pandangan DPR Ketua KONI tidak rangkap jabatan dengan jabatan struktural dan jabatan publik, namun tidak pernah ada sanksi. Kedua, KOI dipimpin oleh ketua *ex-officio* menteri. Ini yang DIM dari DPR.
 - Pandangan pemerintah: Ketua KONI tidak rangkap jabatan dengan jabatan struktural dan jabatan publik dan diberikan sanksi administratif jika melanggar. Kedua, ketua KOI tidak *ex-officio*.
 - Baik, keterangan ini ada pada DIM 363, 378, 384, DIM 398, 399 dan DIM 47.

Jadi saya perlu menjelaskan yang isu-isu krusial saja dahulu supaya masyarakat pun juga punya pandangan kira-kira apa sih isu yang kita perlu kita perdebatkan nanti.

2. Lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan.
 - DIM DPR: badan arbitrase dibentuk oleh pemerintah pusat. Badan arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan nasional tunggal yang putusannya bersifat final dan mengikat.

- Sementara dari pemerintah adalah badan arbitrase tidak dibentuk pemerintah, berarti di luar pemerintah. Badan arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan nasional tunggal yang putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya ada perbedaannya cuma yang satu, dibentuk pemerintah, kalau pemerintah mintanya di luar pemerintah begitu ya.
- Dalam DIM pemerintah DIM 823 dan 824 dapat sikap tidak konsisten.

Saya ulang lagi tadi ke pandangan pemerintah. Ketua KOI tidak *ex-officio* menteri. Tadi menteri kurang terbaca.

3. Kelembagaan Anti-Doping Nasional.

- DIM DPR: tetap sesuai *existing* Pasal 85 tidak mengamanatkan pembentukan lembaga baru.
- DIM pemerintah: ada penambahan substansi pembentukan LADI Lembaga Anti-Doping Indonesia.
- Penambahan substansi ini merupakan usulan baru pemerintah yaitu tim 774, 775 sampai 784.

4. Pendanaan Olahraga.

- DIM DPR mengusulkan: (1) *mandatory spending* 2% untuk dana keolahragaan, (2) adanya pengaturan mengenai pengalokasian anggaran keolahragawan paling sedikit 30% dialokasikan untuk dana abadi keolahragaan, (3) pendanaan olahraga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah serta badan usaha dan masyarakat.
- DIM pemerintah: (1) pemerintah tidak menyetujui *mandatory spending* 2% untuk dana keolahragaan dan paling sedikit 30% dialokasikan untuk dana abadi keolahragaan. Artinya di sini kita beda pendapat, (2) menghapus tanggung jawab pendanaan olahraga oleh badan usaha dan masyarakat. Berarti harus dibiayai oleh negara, APBN, maupun APBD karena badan usaha tidak boleh.
- Ini ada di dalam DIM 621, DIM 622, dan 623.

5. Penghargaan Olahraga.

- DIM DPR: penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, insentif perpajakan.
- DIM Pemerintah: pemerintah menghapus penghargaan olahraga dalam bentuk asuransi, insentif perpajakan, dan jaminan hari tua.
- Dalam DIM 792.

6. Jaminan Sosial.

- DIM DPR: perlu adanya perlindungan pelaku olahraga dalam bentuk program jaminan sosial dan disebutkan dalam undang-

undang, penyelenggaranya oleh BPJS karena ada Undang-Undang SJSN.

- DIM pemerintah: (1) perlu adanya perlindungan pelaku olahraga dalam bentuk program jaminan sosial dan disebutkan dalam undang-undang, berarti sama, (2) menghapus norma penyelenggara jaminan sosial oleh BPJS, berarti di sini kita berbeda DIM DPR adalah oleh BPJS baik itu BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan, pemerintah tidak menyebutkan berarti boleh yang lain kira-kira demikian ya.
- Itu ada dalam DIM 801, 802, 803, 804, dan 805.

7. Ruang lingkup olahraga.

- DIM DPR: ruang lingkup olahraga meliputi olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat.
- DIM pemerintah: ruang lingkup olahraga meliputi: olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Berarti perbedaannya hanya di olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi.

8. Suporter.

- DIM DPR: (1) mengatur tentang suporter olahraga, (2) suporter mendapatkan fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk ya.
- Di dalam DIM pemerintah suporter tidak diatur di dalam undang-undang.

Jadi perbedaannya adalah DPR menginginkan suporter perlu masuk di dalam undang-undang karena apalah artinya olahraga tanpa suporter. Pemerintah tidak menginginkan adanya DIM suporter

9. CSR.

- DIM DPR: menginginkan badan usaha bertanggung jawab terhadap pendanaan olahraga.
- DIM pemerintah: badan usahanya berperan serta di dalam pendanaan olahraga. Jadi kurang lebih saya bisa tangkap, enggak terlalu banyak bedalah sedikit saja ini.

10. Olahraga berbasis teknologi (*esport*)

- DIM DPR: mengatur olahraga berbasis teknologi.
- DIM pemerintah tidak mengatur olahraga berbasis teknologi.
- Ada di DIM 244.

11. Pengalokasian anggaran olahraga dari pemerintah dan pemda kepada induk cabang.

- DIM DPR: langsung mengalokasikan anggaran olahraga kepada induk olahraga cabang.
- DIM pemerintah: tidak sepakat pengalokasian anggaran olahraga kepada induk olahraga cabang.

Di luar isu-isu tersebut pada Raker 13 September jika muncul isu tambahan antara lain:

1. Pengaturan mengenai sistem olahraga atau *big data* olahraga, untuk mendorong adanya penyusun kebijakan pengelolaan talenta atlet dengan menyiapkan dan mengoptimalkan peran sistem informasi dan *big data* analisis olahraga nasional.
2. Industri olahraga, yang memerlukan adanya pengaturan mengenai insentif melalui kebijakan yang bisa membuat perkembangan industri olahraga lebih cepat berkembang.
3. Olahragawan sebagai profesi, yaitu perlunya pemberian status profesi atlet yang masih belum dianggap penting di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan demikian atlet saat ini masih dianggap sebagai kegiatan menyalurkan hobi ketimbang sebuah pekerjaan profesional. Makanya mereka enggak dapat BPJS Ketenagakerjaan Pak karena tidak masuk profesi.

Bapak/Ibu Anggota Komisi X DPR RI yang terhormat.

Terhadap DIM-DIM yang disampaikan pemerintah dan beberapa isu krusial tersebut di atas kami menawarkan agar:

1. Menyetujui DIM tetap sejumlah 191 DIM.
2. Menyerahkan kepada panja untuk dibahas DIM-DIM sebagai berikut: DIM diubah redaksi sejumlah 39 DIM, DIM diubah substansi sejumlah 121 DIM, DIM dihapus sejumlah 123 DIM, DIM usulan baru sejumlah 387 DIM.

Kami persilakan pada pemerintah untuk memberikan tanggapan apakah disetujui? Pak Menteri?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Ketua, para Wakil Ketua, Bapak/Ibu Anggota Komisi X yang terhormat.

Dengan apa yang ditawarkan oleh DPR tadi untuk DIM tetap kami sepakat itu tidak dibahas lagi karena *toh* juga sama posisi pemerintah dan DPR. Kemudian perubahan redaksi, berubah substansi dan dihapus serta usulan baru itu yang akan kita bahas dan nanti akan dibahas panja. Jadi setuju seperti itu.

KETUA RAPAT:

Setuju ya Pak ya? Baik, terima kasih.

Pemerintah setuju. Saya ketuk dahulu.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya saya minta pandangan dari masing-masing fraksi apakah setuju untuk DIM tetap?

F-PDI PERJUANGAN (PUTRA NABABAN):

Pimpinan izin Pimpinan, Putra Nababan.

KETUA RAPAT:

Ya?

F-PDI PERJUANGAN (PUTRA NABABAN):

Pimpinan tadi sebenarnya saya mau interupsi sebelum diserahkan pada pemerintah karena data DIM yang disampaikan oleh komisi dengan pemerintah itu ada perbedaan. Jadi mungkin kalau kita menyepakati jumlah DIM yang kita mau sepakat itu harus sama. Contohnya DIM diubah redaksi, pemerintah 39, DPR 41, DIM diubah substansi pemerintah 121 kita 137, DIM dihapus 123, 122. Jadi mungkin sebelum kita sepakati diketuk, kita sepakati dahulu jumlahnya sehingga nanti kita enak untuk bisa membahasnya.

Demikian pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Putra.

Jadi memang sebetulnya DIM-nya pemerintah ini kebanyakan 800 lebih sementara kalau DIM usulan kita tidak sampai sebegitu. Itu lah yang tadi dikatakan, kalau menyepakati jumlah DIM memang agak sulit. Kita punya datanya enggak? Tadi malah saya bertanya kepada Pak Menteri dari 800 boleh enggak saya potong 50% jadi 400? Kata Pak Menteri silakan saja. Jadi poinnya jangan DIM-nya tapi poinnya adalah melihat ya tetap, tetap kita tidak bahas yang kita bahas nanti di dalam panja adalah yang berubah dan isu-isu baru itu tadi, kira-kira demikian. Karena kalau mengikuti DIM per DIM memang dari kita memang sudah tidak sama itu.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Pimpinan izin.

Jadi mungkin lebih disederhanakan kategorisasinya tetap dan berubah, dua itu saja.

KETUA RAPAT:

Begitu Pak Putra. Jadi kita jangan melihat DIM-nya karena enggak sama ini DIM-nya.

F-PDI PERJUANGAN (PUTRA NABABAN):

Kebetulan Pimpinan DIM tetapnya sama, sama-sama 191 yang lainnya beda itu saja.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Betul jadi yang 191 yang tidak dibahas.

KETUA RAPAT:

Baik saya tanya dahulu kita sepakati kita tidak melihat DIM-nya ya, tapi kita melihat yang tetap tidak kita bahas, yang berubah dan substansinya berubah termasuk juga redaksi dan usulan baru kita masukkan di dalam pembahasan itu. Setuju ya?

F-PDI PERJUANGAN (PUTRA NABABAN):

Setuju Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Setuju ya? Baik. Setuju ini.

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang saya masuk satu persatu kepada masing-masing fraksi. Terkait hal ini, saya mohon pendapat dari masing-masing fraksi apakah setuju untuk yang tidak tetap tadi menjadi pembahasan di dalam panja? Silakan dari Fraksi PDIP. Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (PUTRA NABABAN):

Baik Pimpinan terima kasih.

Saya rasa Fraksi PDI Perjuangan setuju bahwa DIM yang tidak sesuai redaksi substansi dihapus, usulan baru itu menjadi kerja kita bersama pemerintah untuk dibahas di panja nanti. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari PDIP.

Berikutnya dari Golkar.

F-P. GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Ya terima kasih Pimpinan.

Sama dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golkar juga menyatakan hal-hal yang belum kita setujui saat ini akan kita bahas secara substansi di panja yang akan kita bentuk.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Fraksi Golkar.

Selamat datang Pak Dwi ya dari Kemenpan RB ya.

Berikutnya dari Fraksi Gerindra. Silakan.

F-P. GERINDRA (Prof. DR. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati.
Saudara Menteri dan seluruh jajaran dan dari kementerian-kementerian.

Seperti kita sepakati awal tadi yang kita bicarakan hanya yang berbeda saja. Jadi yang sudah sama tak usah lagi.

Sekian. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik setuju ya Gerindra.

Berikutnya dari Fraksi Nasdem apakah ada?

F-P. NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.):

Virtual Pimpinan hadir.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.):

Kami dari Fraksi Nasdem juga setuju Pimpinan untuk nanti yang berbeda atau dibahas lebih lanjut di panja selanjutnya.

Seperti itu Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Ratih.

Berikutnya dari Fraksi PKB.

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya banggakan seluruh jajaran Komisi X.
Juga yang saya banggakan Mas Menteri beserta seluruh jajarannya.

Jadi kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui bahwa yang perbedaan-perbedaan ini perlu kita gali bersama karena memang Undang-Undang SKN ini sangat ditunggu-tunggu dan juga sangat banyak masukannya. Karena kita ketahui bahwa kita sekarang bonus demografi, banyak sekali orang yang terlibat dengan olahraga, dengan pandemi ini banyak masukan-masukan dan juga keinginan-keinginan baru dan terobosan-terobosan baru baik itu dalam perencanaan atletnya maupun juga persiapan atlet ke depan. Tentunya kita ingin menggali sedalam dalamnya apa pun perbedaan yang ada antara pemerintah dan juga kita bisa nanti mendapatkan hasil temu yang indah untuk semuanya.

Mungkin itu. Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari PKB.

Selanjutnya dari Fraksi Demokrat apakah hadir dari virtual dahulu?

F-P. DEMOKRAT (A.S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI):

Hadir virtual Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan PSIS. Eh PSIS lagi, Mas Yoyok.

F-P. DEMOKRAT (A.S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI):

Maaf ini enggak keluarkan gambar dahulu lagi kegiatan di jalan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P. DEMOKRAT (A.S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI):

Ya kami dari Fraksi Partai Demokrat sama seperti kawan-kawan tadi, kita prinsipnya setuju Ketua untuk dibahas kemudian.

Itu saja Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih. Ini suara bukan hanya dari PSIS, ini suara dari Pak Kaesang juga ini Pak.

Baik berikutnya dari Fraksi PKS. Apakah hadir? Oh ya ada, silakan.

F-PKS (H. MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sudah? Oke baik. Setuju langsung.

Berikutnya dari Fraksi PAN hadir?

F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi.):

Hadir virtual Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke, silakan.

F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi.):

Izin Ibu Dewi Coryati sedang di dapil. Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri dan seluruh jajaran yang hadir dan juga seluruh kementerian yang hari ini hadir di dalam RUU SKN.

Pimpinan Kang Dede, Pak Huda, dan juga Pak Fikri.

Pada prinsipnya kami Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan RUU SKN ini sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tentunya yang paling penting sekali untuk kita persamakan visi dan misi kita terkait dengan substansi yang diubah atau pun ada perbaikan ataupun ada tambahan pasal-pasal, ini menjadi suatu hal yang sangat krusial demi perbaikan olahraga dan tentunya semua yang terlibat para *stakeholders* di dalam sistem olahraga nasional ini, atlet, lalu kemudian pelatih itu yang terpenting sekali karena mereka yang di belakang layar inilah yang kemudian juga harus kita apresiasi kinerja mereka untuk menciptakan prestasi olahraga nasional di mata dunia.

Itu saya Pimpinan terima kasih. Kami Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU SKN sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Teh Desy.

Berikutnya terakhir dari PPP, ada kayaknya.

F-PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur pada Allah dan selawat pada Rasulullah.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi X.
Pak Menteri serta seluruh jajaran.
Kemudian yang mewakili Menpan RB.

Kami dari Fraksi PPP menyepakati apa yang telah dibahas tadi dan *Insyah Allah* tentang krusial yang substansi belum kita sepakati akan kita bahas nantinya dan semoga *Insyah Allah* dengan lahirnya revisi Undang-Undang Keolahragaan Nasional ini mimpi besar mencapai visi keolahragaan yang melahirkan banyak prestasi *Insyah Allah* akan bisa kita wujudkan untuk Indonesia yang maju ke depan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih dari PPP. Berarti sudah 9 fraksi, sudah semua ya? 9 fraksi sudah menyetujui untuk dilanjutkan ke dalam Panja.

Sebelum saya ketuk mungkin Pak Fikri mau memberikan tambahan sedikit.

PIMPINAN KOMISI/F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua Panja.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua Komisi X.
Pimpinan dan Anggota Komisi X.
Pak Menteri dan juga ini tim dari eksekutif semua, dari pemerintah.

Saya tidak akan menambahi Kang Dede cuma memberi catatan supaya nanti. Jadi saya sepakat dengan termasuk fraksi saya juga sudah jadi sepakat DIM tetap nanti tidak akan dibahas. Yang akan dibahas adalah diubah redaksi, diubah substansi, dihapus, usulan baru tetapi jangan ditutup apabila ternyata dari usulan baru atau dihapus kemudian kita sepakat lantas ada penyesuaian DIM yang tetap, jadi jangan ditutup. Maksudnya misalnya karena penyesuaian misalnya namalah atau apa segala macam karena nanti kalau ini akan kaku nanti. Jadi penyesuaian meskipun DIM-nya tetap dan kita sepakat tidak akan membahas tapi karena akibat dari yang diubah lantas DIM tetap itu kan berubah. Jadi mohon untuk dibuka DIM tetap bisa dibahas bila dalam rangka penyesuaian DIM yang berubah. Itu satu.

Kemudian yang kedua mohon izin meskipun ini Panja SKN tapi karena Komisi X kemarin mendapat tamu dari Papua jadi kesempatan ini, ini Komisi X berjanji akan meneruskan ke Menteri Pemuda Olahraga.

KETUA RAPAT:

Ke Pak Isa mustinya itu cocoknya Pak.

PIMPINAN KOMISI/F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):

Pemuda dan Olahraga maka nanti saya mohon diizinkan untuk menyerahkan ini Kang Dede. Jadi intinya sih tentang jadi Komisi X sudah menerima DPR Papua kemudian mendorong memfasilitasi pertemuan dengan Ketua dan Anggota Pansus. DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: mendorong akan memfasilitasi pertemuan Ketua dan Anggota Pansus PON dan Peparnas dengan Kemenpora, mudah-mudahan sudah bertemu paling tidak dengan Sesmen mungkin, mudah-mudahan.

SEKRETARIS MENTERI KEMENPORA RI (Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A.):

Mohon izin, sudah bertemu Bapak Fikri.

PIMPINAN KOMISI/F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):

Berarti tugas satu sudah selesai. Kemudian berarti Kemenpora juga sudah merespons. Terima kasih Pak. Suaranya Pak Gatot *nggeh?*

SEKRETARIS MENTERI KEMENPORA RI (Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A.):

Nggeh, nggeh Pak mohon izin.

PIMPINAN KOMISI/F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):

Terima kasih Pak Gatot ini barangkali ini *live* kalau *live* kan ditonton orang jadi ini kita laporan sekalian dengan Pansus PON kemudian mendukung secara serius agar pelaksanaan PON XX, Peparnas XVI dapat

berjalan dengan lancar. Kemudian Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan yang disampaikan Ketua dan Anggota Pansus PON XX, Peparnas XVI Papua kepada pemerintah khususnya Kemenpora agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Saya kira begitu ini intinya Kang Dede, saya mohon maaf untuk saya sampaikan ini kepada Pak Menpora. Terima kasih. Saya akhiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Biar kawan-kawan dari Papua melihat bahwa Pak Fikri sudah menyampaikan ini.

PIMPINAN KOMISI/F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.):

Foto-foto.

KETUA RAPAT:

Saya rasa yang paling cocok itu diberikan ke Pak Isa itu Pak.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Enggak Pak, pemerintah satu.

KETUA RAPAT:

Satu ya?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Ya satu pemerintah.

KETUA RAPAT:

Saya senang ini Pak menteri ini selalu satu ini, konsisten.

Ada tambahan sedikit dari Ketua Komisi mungkin untuk terkait hal ini. silakan.

PIMPINAN RAPAT/F-PKB (H. SYAIFUL HUDA):

Terima kasih Kang Dede.

Pak Menteri beserta seluruh pejabat dari seluruh kementerian yang hadir. Kementerian Kemenpora dan yang lainnya tadi semuanya hadir, terima kasih.

Saya hanya menguatkan saja, kita setuju tadi DIM tetap 191 tidak akan kita bahas. Tadi diingatkan oleh Pak Fikri kalau dalam pembahasan berikutnya terkait berarti akan kita bahas termasuk potensi adanya tambahan baru menyangkut beberapa isu yang selama ini menjadi *concern* publik olahraga. Saya ingin mengingatkan lagi saja Pak ini kebetulan hasil Raker tanggal 13 September yang waktu itu sudah sempat kita sampaikan yaitu menyangkut soal isu *big data* ini, kemudian isu menyangkut soal industri olahraga, yang ketiga isu menyangkut soal olahragawan sebagai profesi, dan yang ketiga menyangkut soal *esport*.

Saya kira ini perlu Kang Dede kita rumuskan dengan baik karena ini jadi *common sense* dunia olahraga kita hari-hari ini dan kalau ini menjadi bagian dari semangat yang bisa dimasukkan dalam revisi Undang-Undang SKN saya kira kita bisa menjawab ekspektasi publik untuk masa depan olahraga kita di masa-masa yang akan datang.

Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ketua.

Tadi saya sudah disampaikan oleh Mas Menteri saya katakan ini kita cuma tersisa dua masa sidang kita membahas ini jadi kalau bisa ya jangan lebih dari dua masa sidang. Pak Menteri agak sedikit mengancam saya kalau sampai minta perpanjangan waktu nanti akan ditanya ini Ketua Panjanya kerja apa enggak? Jadi saya pun juga akan berusaha kita mempercepat proses ini dan isu-isu yang krusial kita selesaikan terlebih dahulu baru yang titik dan sebagainya. Itu yang biasa ya bikin lama kan yang soal titik koma dan atau dan sebagainya. Kita isu krusial itu kita bahas terlebih dahulu biar cepat sehingga nanti dua masa sidang selesai.

Baik Bapak dan Ibu karena semua fraksi sudah menyetujui jadi saya ketuk dahulu ya ke sepakat untuk diteruskan di dalam panja.

(RAPAT: SETUJU)

Berikutnya agenda kedua raker ini akan memutuskan membentuk Panja RUU dengan judul Panja RUU Perubahan Undang-Undang SKN karena pembahasannya sudah kita lakukan sebelumnya. Kami tawarkan apakah menyetujui untuk membentuk Panja RUU Perubahan Undang-Undang SKN, kami persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan secara singkat daftar anggota panja dari pemerintah minimal mengenalkan ketua timnya dan perwakilan dari masing-masing K/L sesuai surpres yang akan terlibat aktif dalam pembahasan RUU. Kami persilakan kepada Menpora RI.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Ya terima kasih Pimpinan.

Pertama terima kasih atas persetujuan yang baru saja kita sepakati tadi. Hanya DIM yang belum kita sama itu yang dibahas dan perlu kami sampaikan jumlah DIM ini jadi 861 itu mencerminkan bahwa kita dari internal pemerintah benar-benar serius menangani persiapan. Jadi bukan hanya DIM dari Kemenpora tetapi kami juga mengakomodir DIM dari berbagai kementerian/lembaga lainnya. Jadi mohon maaf Kang Dede kalau jumlahnya jadi 861. Nanti di dalam pembahasannya itu menjadi berapa kan yang penting dua masa sidang itu yang menjadi target Kang Dede dan dari pemerintah tentu ini bisa berganti tetapi yang nanti bertanggung jawab.

Baik, dari Kementerian Dalam Negeri Ibu Hari Nur Cahya Murni. Nama topnya Mbak Nunung.

KETUA RAPAT:

Mbak Nurul?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Mbak Nunung, topnya itu. Jadi kalau Bapak mau cari Ibu Cahya di Kemendagri enggak akan ketemu.

KETUA RAPAT:

Oh pantesan.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Cari Mbak Nunung dapat.

PIMPINAN RAPAT / F-PKB (H. SYAIFUL HUDA):

Makanya belum pernah ketemu Kang Dede mencari Pak.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Makanya Bapak.

Kemudian dari Kementerian Keuangan Pak Isa Rachmatarwata. Beliau sudah sangat familier dan dikenal oleh seluruh anggota DPR.

KETUA RAPAT:

Dan ditakuti oleh Anggota DPR.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Tapi orangnya baik.

Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM Pak Dhahana Putra, ini yang akan sama-sama. Kemudian dari Kementerian Pan RB Pak Dwi Wahyu Atmaji.

KETUA RAPAT:

Ketua timnya Pak?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Ketua timnya dari Kemenpora Pak Gatot Dewa Broto.

KETUA RAPAT:

Pak Gatot.

SEKRETARIS MENTERI KEMENPORA RI (Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A.):

Mohon izin.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Gatot.

Pak Gatot mau menerima sebagai Ketua Tim atau menolak? Silakan.

SEKRETARIS MENTERI KEMENPORA RI (Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A.):

Siap melaksanakan tugas. Mohon izin sedang mewakili Pak Menteri untuk rapat PON.

KETUA RAPAT:

Oh pantas.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Itu, tapi pemainnya bisa berganti-ganti Kang Dede. Biasa, ada pergantian pemain.

KETUA RAPAT:

Biasa Pak bangku cadangan selalu ada.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Ya nanti cadangan orang yang berhalangan. Jadi tadi yang kami sampaikan adalah yang bertanggung jawab di kementerian masing-masing.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri.

Penjelasan pemerintah mengenai susunan panja sudah kami dengarkan dan diharapkan nanti menyerahkan daftar lengkapnya pada kami agar bisa aktif. Sekali lagi kita paham kesibukan Bapak-bapak semua tentunya mewakili komisi-komisi yang lain tetapi karena tadi saya dikatakan masa bakti RUU ini kurang lebih hanya dua periode ini berarti kita akan main cepat. Jadi mungkin diharapkan kehadiran dari masing-masing kementerian.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Dua masa sidang Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Dua masa sidang bukan dua periode.

PIMPINAN KOMISI/F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.):

Dua periode 10 tahun dong.

KETUA RAPAT:

Dua masa sidang iya, iya mohon maaf. Terima kasih senior.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Kalau periode tiga Pak bukan dua, tiga periode.

KETUA RAPAT:

Oke, setuju ya? Baik-baik kita kembali ke laptop.

Terima kasih kepada Menpora RI yang sudah menyampaikan susunan panjangnya. Baik berikutnya kepada masing-masing poksi kami juga mengharapkan untuk segera menyerahkan nama-nama anggota panjangnya kepada sekretariat komisi dan sebagai informasi pada Panja RUU SKN pada

yang sebelumnya memang sudah ada nama-nama tapi di dalam panja yang sekarang mungkin terjadi perubahan pemain sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri.

Sekali lagi saya akan bertanya kepada Bapak/Ibu semua apakah pembentukan Panja RUU Perubahan Undang-Undang SKN dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih. Ada suara dari Makassar itu saya dengar tadi, Bang Andi.

Bapak/Ibu Anggota Komisi X yang kami hormati.

Dengan selesainya pembahasan agenda rapat kerja ini maka sebelum kami menutup acara raker ini izinkan Pimpinan menyampaikan beberapa konsep keputusan/kesimpulan raker hari ini. Silakan ditayangkan.

F-PDI PERJUANGAN (PUTRA NABABAN):

Pimpinan sambil menunggu.

Pimpinan mau tanya ini terkait dengan isu-isu krusial yang tadi Pimpinan baca dikontraskan antara pemerintah dan DPR ini nanti kita bahasnya di panja dan menterinya tidak hadir dalam panja dan kemungkinan juga banyak pemain pengganti atau memang harus dibahas dengan menteri diselesaikan isu krusial itu? Sehingga nanti di panjangnya jalannya cepat. Saya menduga nanti kalau di panja itu kita membahas isu krusial tapi pengambil keputusannya itu tidak bisa mengambil keputusan dalam situ maka DIM-nya itu akan berjalan lama. Jadi saya usulkan krusial bisa kita selesaikan panjangnya pasti bisa cepat.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Memang kalau dari pimpinan redaksi dahulu selalu minta seperti itu Pak. Tapi begini saya tawarkan kita ini kurang lebih sudah menyusun agenda kita akan konsinyering terlebih dahulu dan pada saat konsinyering saya mengharapkan Pak Menteri bisa hadir tiga hari itu kita akan katakanlah berkuat soal isu-isu utamanya. Selebihnya tentu bisa diganti oleh Pak Gatot atau yang lain. Atau paling tidak pada saat mengambil satu keputusan isu krusial maka siapa pun yang hadir di sana harus berkomunikasi dengan Mas Menteri agar keputusan bisa didapatkan. Karena kita kan belum ketuk Pak Putra, kita yang penting kesepakatan, nah itu namanya adalah lobi nantinya, kita pahami itu. Begitu ya Pak Menteri ya? Saya pikir Beliau ini sudah biasa membahas DIM yang 3 ribu, jadi saya yakin kalau cuma 400 saja sih cepatlah.

Baik kita tampilkan terlebih dahulu ya.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Saya langsung masuk kesimpulan sementara keputusan.

1. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakati jumlah DIM RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebanyak 861 DIM dengan perincian jenis dan jumlah tim sebagai berikut: DIM yang tetap adalah 191, DIM yang diubah redaksi adalah 39, DIM yang diubah substansi 121, DIM yang dihapus 123, dan DIM usulan baru 387. Total 861.
2. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati DIM tetap dan selanjutnya memberikan mandat kepada panitia kerja untuk membahas DIM diubah redaksi, DIM diubah substansi, DIM dihapus, dan DIM usulan baru dengan perincian nomor DIM sebagai berikut.

Tentu saya tidak akan membacakan ya. Bapak dan Ibu silakan nanti dilihat sendiri untuk jumlah DIM. Jadi a) DIM tetap sebanyak 191 DIM dimulai dari DIM 1 dan seterusnya sampai DIM 860. b) diubah redaksi 39 DIM dimulai dari DIM 19 dan seterusnya sampai DIM 820. c) DIM diubah substansi 121 dimulai dari DIM 4 dan seterusnya sampai dengan DIM 848. d) DIM dihapus 123 DIM dimulai dari DIM 28 dan seterusnya sampai 840 dan e) DIM usulan baru 387 DIM dimulai dari DIM 6 dan seterusnya hingga DIM 836.

3. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menggunakan metode berdasarkan DIM diubah redaksi, DIM diubah substansi, DIM dihapus, dan DIM usulan baru.
4. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati pembentukan Panja RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terdiri dari Tim Panja DPR RI berjumlah 30 orang dan Pemerintah berjumlah 61 orang dengan susunan anggota panja terlampir.

Ini sebenarnya kalau dari sistem kompetisi ini enggak pas ini enggak *fair play* ini 30 lawan 60 Pak.

5. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati isu-isu krusial pada Raker tanggal 13 September sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari DIM RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan menjadi salah satu bahan rujukan dalam pembahasan panja.

Demikian Bapak dan Ibu saya mungkin tawarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu anggota untuk membantu melakukan koreksi. Saya persilakan apakah ada tambahan Pak Ketua?

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Ada Pak, Kang Dede.

KETUA RAPAT:

Ya?

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Apakah bukan sebaiknya nomor 4 itu jadi nomor 1? Komisi X DPR RI menyepakati pembentukannya dahulu baru uraiannya. 1, 2, 3, 4, 5.

KETUA RAPAT:

Sesuai agenda Bang, agenda pertama kita adalah menyepakati DIM dan agenda kedua baru pembentukan panja.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Oh.

KETUA RAPAT:

Iya Bang enggak apa-apa kita paham Bang.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Oke Pak terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan? Kalau cukup? Baik.

Bagaimana dari pemerintah apakah cukup kesimpulan ini?

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Ya setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, setuju ya. Jadi dengan demikian maka kesimpulan kita adalah sebagai berikut yang tadi kita bacakan.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Demikianlah kesimpulan kita pada hari ini. Sesuai janji kita sebelum jam 16.00 WIB ini adalah tanda-tanda kita bisa akhiri cepat ya sesuai dengan harapan, mudah-mudahan berlanjut juga pada saat pembahasan-pembahasan. Untuk itu kami persilakan kata akhir dari Menpora RI untuk menandai berakhirnya kesimpulan kita pada hari ini. Silakan.

PIMPINAN KOMISI/F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):

Kang Dede sebentar Kang Dede.

KETUA RAPAT:

Oh Pak Fikri, baik.

PIMPINAN KOMISI/F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):

Mungkin mengingatkan saja karena Pak Menteri ini mantan Anggota DPR. Panja bisa jalan dan mengambil keputusan kalau sesuai dengan tata tertib dan tata tertib DPR itu pengambilan keputusan enggak mesti dengan menteri, nanti akhir dengan menteri tetapi selalu panja didampingi oleh eselon I, ini sesuai dengan tata tertib, eselon I. Jadi bisa mengambil keputusan, kalau tidak panja ini akan terlunta-lunta nanti kalau dan bisa tidak jalan kalau kemudian tanpa ada eselon I. Sebaiknya mungkin kalau andaikan mendelegasikan sesuai dengan tata tertib.

Begitu, saya mengingatkan saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Kiai.

Pak Menteri yang saya hormati.

Saya bisa memahami kekhawatiran dari Pak Kiai barusan karena begini kami punya waktu dua masa sidang tentu terpotong reses, kedua ada PON. Dengan adanya PON kemungkinan besar perangkat Kemenpora akan bertugas, tapi kami sepakat kita tetap jalan. Jadi oleh karena itu nanti Mas Menteri harus mengutus eselon I untuk mendampingi kita panja, jangan sampai semuanya ada di PON. Karena kalau kita menunggu PON nanti dua minggu kita akan ya kehilangan kesempatan. Itu kira-kira salah satu kekhawatirannya Beliau adalah seperti itu.

Oh ya baik ya saya pikir masalah soal rapat panja, rapat kerja dipimpin oleh seorang pimpinan komisi dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi undang-undang RUU tentang Perubahan Undang-Undang SKN. Keanggotaan tim panja paling banyak setengah atau satu per dua dari jumlah anggota komisi dan selanjutnya nanti hal-hal yang tadi saya bilang teknis mungkin diserahkan pada timus atau timsin sehingga kita lebih membahas pada isu-isu krusial yang kita sampaikan tadi. Ini tidak usah saya baca ya Pak ya karena ini teknis sekali.

Saya persilakan Mas Menteri. Hafal banget.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Jangan kelamaan saya di sini nanti saya pindah ke sana.

Ya saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh Kang Dede. "Mas Menteri begitu Ampres ada, saya jamin dua minggu ini selesai". Ingatan saya masih cukup bagus, enggak ini saya beritahu kepada teman-teman yang dari kementerian lain. Jadi Ibu dan Bapak inilah semangat Komisi X mendorong supaya Undang-Undang SKN ini cepat lahir. Jadi jangan khawatir kalau Ibu dan Bapak yang biasa bermitra dengan komisi lain agak susah dan lama kalau di Komisi X cepat Ibu. Kita optimis target jam 16.00 WIB selesai jam 15.00 WIB, akan begitu perjalanan dari undang-undang ini pembahasannya.

Terima kasih Ketua Panja, Pak Ketua, para Wakil Ketua, Ibu/Bapak Anggota yang terhormat, saya kira kepentingan kita bersama undang-undang ini harus segera lahir dan kami akan mematuhi yang telah disampaikan tadi baik tata tertib, MD3, dan lain sebagainya kami pasti akan dipimpin oleh eselon I dan semua yang datang itu bisa mengambil keputusan jadi jangan dikhawatirkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Memang kalau mantan Ketua Komisi II itu memang harus cepat begitu. Hanya masalahnya saya harus koreksi Pak Menteri. Memang benar waktu itu saya mengatakan dua minggu selesai jika belum ada tambahan DIM dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Nah kalau tambahan DIM-nya sudah 400 ya begitulah kira-kira. Tapi yang jelas akan kita selesaikan secepat mungkin, yang saya sering dengar bahwa biasanya *deadlock* itu akan terjadi dalam hal kelembagaan keuangan. Nah dua itu saja, jadi saya harus melihat sepatunya Pak Isa-nya itu nomor berapa begitu kan ya. kelembagaan itu nanti di Kemenpan RB. Kalau di antara kita mungkin sudah tidak ada dusta di antara kita Pak Menteri.

Demikian sekali lagi Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Dengan demikian maka panja akan kita bentuk ya dan akan bertugas mulai esok hari pun kita mungkin sudah akan mulai bertugas.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih Mas Menteri, Pak Dwi, juga Pak Chandra, Ibu Nunung, betul ya Ibu Nunung ya? Pak Isa, Pak Dhahana dan seluruh jajaran semua yang hadir sini atas kesempatannya. Terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi X. Segera saja nanti menyampaikan siapa kira-kira anggota panja yang akan diutus oleh masing-masing fraksi. Dengan demikian kami tutup dengan membaca *alhamdulillah*.

Wabillahittaufig wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.12 WIB)

JAKARTA, 22 SEPTEMBER 2021

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

**DADANG PRAYITNA, S.IP, M.H.
NIP. 196708061990031003**